

PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN MAJENE

Muhammad, Farhanuddin

Dosen Pada Program Studi Ilmu Politik

Universitas Sulawesi Barat

E-mail : muhammad.fisip@unsulbar.ac.id, farhan.sulbar@gmail.com

Abstract

In playing their political roles, each social and religious organization in Indonesia has their own values and ideals to apply and to maximize within the context of their socio-political life in the country. Nahdhatul Ulama (NU) of Majene Regency has inevitably been in this circumstance. This article is intended to observe the role of Nahdhatul Ulama in Majene Regency played for political education. The research was qualitatively conducted in Majene and descriptively analyzed. The samples were purposively chosen among the Syuriah and Tanfidziah board of this local Nahdhatul Ulama. This is due to the fact that the dynamic of Nahdhatul Ulama in Majene is centralized among the roles of the ulamas themselves. The meaning of politics for the majority of NU members in Majene has been reduced to something negative. This in turn needs the language of religious figures to provide the right meaning. In this case, the political language of the ulamas of NU is needed in order to convey the message of political education which is in line with the values and ideals of NU itself. The deliverance of such message in the language of NU influential figures in the area is believed to be rightly conveyed and easily accepted by its members.

Keywords:

Political Education, Nahdlatul Ulama (NU)

Pendahuluan

Di Indonesia, kelompok-kelompok Islam selalu mempunyai peran strategis dalam konstalasi politik.¹ Misalnya Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) di tahun 1926, merupakan dua organisasi Islam di Indonesia yang sejak awal berdirinya kelompok Islam ini tidak hanya menebar bakti pada gerakan keagamaan akan tetapi juga dalam ranah politik. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang mayoritas sekaligus terbesar di dunia,

¹Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. (Yogyakarta, Galang Press, 2001) h. 9

Indonesia memiliki keunikan dengan banyaknya organisasi Islam yang berdiri. Mulai dari organisasi Islam yang sifatnya tradisional, moderat hingga modern yang banyak mengadopsi paham yang lahir di barat dengan konsep liberal dan sekulernya. Masing-masing dapat tumbuh dan berkembang di iklim yang demokratis dalam memperjuangkan nilai idealnya. Adapun NU merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yaitu diperkirakan sebanyak 75% dari total penduduk muslim sebagaimana hasil survey yang pernah dilakukan Indobarometer.²

Sebagai suatu organisasi Islam yang menjalankan peran politiknya, NU juga menjalankan fungsi pendidikan politik. Arus demokratisasi yang selalu didorong di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru juga semakin membuka ruang bagi seluruh komponen dalam sistem politik Indonesia untuk dapat berperan aktif. Kondisi ini tentu membutuhkan masyarakat yang tidak sekedar aktif tapi juga dibekali kecakapan dalam keterlibatannya dalam mendorong terwujudnya bangsa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, peran untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat bukan hanya giat dilakukan oleh partai-partai politik dan organisasi formal pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat khususnya lembaga-lembaga non-pemerintah.

Urgensi pendidikan politik masyarakat dalam demokrasi diarahkan agar masyarakat mampu memperjuangkan hak politiknya. Hal tersebut dapat meminimalisir potensi pihak-pihak tertentu yang menjadikan perannya dalam politik hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompoknya karena masyarakat memiliki pendidikan politik yang rendah. Sebaliknya, pendidikan politik yang diperjuangkan juga dapat diarahkan agar pada perwujudan peran politik yang beretika bagi semua pihak, termasuk para penguasa. Dengan demikian diharapkan tercipta masyarakat yang dicita-citakan di bawah kendali para pemimpin yang mempunyai idealisme yang dapat berjalan selaras dengan kepentingan rakyat banyak.

NU dalam menjalankan perannya melakukan pendidikan politik banyak dipengaruhi oleh pergulatan arus pemikiran terhadap hubungan antara agama dan politik para tokohnya atau populer disebut dengan kyai. Umumnya kyai merupakan gelar yang disandang oleh seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang-bidang ilmu

²<http://www.muslimedianews.com/2014/05/jumlah-warga-nu-83-juta-jiwa-di.html?m=1> (Pada tanggal, 28 Januari 2015, pkl. 15.30 WITA)

agama Islam. Mereka mempunyai peran esensial dalam masyarakat dan mendominasi pengaruh kultural, khususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

Terdapat 3 faktor penting yang membuat eksistensi kyai di masyarakat begitu penting. *Pertama*, tingginya derajat mobilitas kyai dalam membangun jaringan hubungan dengan komunitas diluarnya, baik sesama kyai ataupun pertemuan dengan jaringan-jaringan tertentu. Hal tersebut memungkinkan mereka memperoleh informasi baru yang bermanfaat bagi sekitarnya. *Kedua*, posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan di pesantrennya, menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa. *Ketiga*, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, termasuk akses informasi yang lebih baik.³

Jika ditilik dari perjalanan NU dalam kancah politik di Indonesia pasca kemerdekaan, dimana tercatat sejak tahun 1949 NU secara nyata terlibat dalam politik praktis dengan bergabung menjadi Partai Masyumi hingga akhirnya memutuskan untuk terlibat langsung dalam politik praktis, secara sederhana pemikiran politik NU dapat dideskripsikan. Selain itu, pemikiran politik NU juga dapat ditilik dari tradisi pemahaman beragama mereka yang berdasarkan pemahaman *Ahl al- Sunnah wa al- Jamaah* atau Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja) yang mempunyai 3 semangat utama, yaitu kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme.⁴ Dimana setiap semangat utama tersebut mempunyai pemaknaan masing-masing.

Pertama, kebijaksanaan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tidak menimbulkan kerugian. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki doktrin bahwa mengedepankan upaya menghindari bahaya akan lebih baik dari pada melakukan suatu kebaikan, bila dihadapkan pada dua hal yang sulit, diutamakan mengambil yang risikonya lebih kecil dan dilarang memberantas bahaya dengan bahaya. *Kedua*, keluwesan dimaknai sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan konteks sosial dan politik yang ada serta tidak pernah mengajukan sesuatu yang sifatnya absolut. Konsep Islam sebagai *rahmatan lil alamin* membuat Islam seharusnya dapat diterima dimana saja

³Laode Ida. 2004. *Kaum Muda NU, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2004), h. 5

⁴Lihat Hilmi Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni, *NU: Identitas Islam Indonesia*, (Jakarta: Elsas, 2004) h.131

dan memberikan rahmat bagi semuanya. Untuk itu, dalam keadaan tertentu di mana keadaan itu Islam sulit diterima, maka doktrin NU menganjurkan untuk mengambil kebijakan bagaimana mereka dapat diterima pada masyarakat tersebut tanpa meninggalkan kaidah ajaran Islam sendiri. *Ketiga*, moderatisme dimaknai sebagai upaya jalan tengah yang dilakukan untuk menghindari sikap radikal dan bersikap hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Pendekatan ini mendominasi pemikiran politik NU untuk meredam konflik antara Islam garis keras dan kaum nasionalis untuk mewujudkan kondisi perpolitikan yang harmonis dan terpadu.⁵

Uraian singkat pandangan politik NU di atas menjadi koridor organisasi ini dalam menjalankan perannya. Tidak terkecuali di Majene sebagai salah satu kabupaten yang menjadi basis massa NU di Sulawesi Barat. Sebagai kabupaten yang memiliki penduduk mayoritas Islam, tradisi kultural keagamaan NU di Majene sangat kental dipraktekkan. Misalnya perayaan maulid Nabi Muhammad saw yang secara rutin diperingati di Salabose⁶ dan seluruh desa di Majene, pembacaan *barzanji* di momen penting masyarakat,⁷ zikir rutin bersama di mesjid-mesjid, dan banyak lagi tradisi kultural keagamaan NU yang secara massif dipraktekkan masyarakat muslim Majene.

Selain diketahui sebagai organisasi Islam yang berpengaruh bagi masyarakat di Majene, peran NU di Majene juga relatif aktif dalam politik. Misalnya, salah satu anggota DPD RI periode 2014-2019 asal Sulawesi Barat adalah ketua PWNU Sulawesi Barat periode 2008-2013 merupakan putera Majene. Oleh karena itu, mengingat urgensi pendidikan politik di era demokrasi seperti sekarang ini, peran NU dalam pendidikan politik di Majene juga menjadi penting untuk dikaji lebih jauh. Hal tersebut mengingat nilai Islam yang juga melekat pada organisasi NU tentu memberi warna tersendiri dalam metode dan ide yang dibawakannya dalam rangka melakukan peran pendidikan politik, khususnya di Kabupaten Majene.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana NU menjalankan perannya sebagai agen pendidikan politik di Majene. Diharapkan hasil

⁵Titik Triwulan Tutik dan Jonaedi Efendi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008) h. 32-34

⁶Perayaan Maulid di Salabose yang rutin diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal merupakan salah satu aset budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Masyarakat meyakini sebagai momen penuh berkah dan olehnya disakralkan.

⁷Momen penting dimaksud misalnya, aqiqah, sunatan, pernikahan, memasuki rumah baru, ketika akan melaksanakan ibadah haji atau umrah, syukuran, dan sebagainya. Bahkan umumnya mesjid-mesjid yang terdapat di pedesaan rutin membaca *barzanji* setiap malam Jum'at.

dari penelitian ini akan dapat menjadi khazanah tambahan bagi proses pembelajaran pada mata kuliah kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Selain tentu saja secara luas juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kabupaten Majene. Daerah ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, dengan latar belakang masyarakat yang didominasi oleh etnis Mandar dan beragama Islam. Alasan dipilihnya kabupaten Majene dalam penelitian ini adalah karena mayoritas umat Islam di daerah ini adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Kuatnya tradisi keislaman dengan corak Nahdlatul Ulama (NU) misalnya kebiasaan membaca *barzanji* pada momentum tertentu di masyarakat seperti syukuran, banyaknya majlis-majlis zikir, hingga pada besarnya pengaruh para kiai bagi masyarakat Majene⁸ dan sebagainya dapat menjadi bukti.

Adapun alasan lain adalah karena Majene merupakan tempat tinggal dari mantan ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat periode 2008-2013, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) periode 2009-2014 dan 2014-2019. Hal tersebut dapat menjadi indikator dinamika politik warga Nahdlatul Ulama (NU) di kabupaten Majene sangat intens. Sehingga dianggap tepat untuk menjadi latar penelitian dalam melihat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah politik.

Dasar Penelitian

Untuk menganalisis peran NU dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Majene, maka dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kualitatif. Teknik penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data deskriptif yang lebih mendalam dalam menemukan dan menelusuri data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

⁸ Misalnya dalam hal masyarakat tengah menghadapi kesulitan tertentu dalam hidupnya, sering mendatangi kiai yang menjadi panutannya untuk dimintai pandangannya atau bahkan membacakan doa agar kesulitannya dimudahkan oleh Allah SWT.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lainnya.⁹ Adapun karakteristik yang dimiliki penelitian kualitatif, yaitu:¹⁰

- a. Memiliki minat teoritis pada proses interpretasi manusia.
- b. Memfokuskan perhatian pada studi tindakan manusia dan artefak yang tersituasikan secara sosial.
- c. Menggunakan manusia sebagai instrumen penelitian utama.
- d. Mengandalkan terutama bentuk-bentuk naratif untuk mengkode data dan menulis teks untuk disajikan kepada khalayak.

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya maka penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam gambaran tentang fokus penelitian yaitu peran NU dalam upaya melakukan pendidikan politik di Kabupaten Majene. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis untuk memenuhi tujuan dan kerangka logika di atas.

Penelitian deskriptif analisis pada dasarnya merupakan langkah-langkah untuk melakukan reinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam masalah yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti.¹¹

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Data primer yakni data-data kualitatif yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder yakni data-data penunjang untuk melengkapi hasil penelitian, ataupun untuk memberikan gambaran secara jelas pada latar penelitian,

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h.6

¹⁰ Lihat Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h.158

¹¹ Lihat Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.32.

berupa literatur-literatur dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan latar atau subjek yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, digunakan dengan melalui tiga cara, yaitu:

a. Studi literatur

Studi literatur dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia untuk melengkapi analisis. Literatur-literatur tersebut bisa berbentuk kliping koran atau majalah, buku-buku, dokumen-dokumen, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan latar yang sedang diteliti. Studi literatur ini sangat berguna dalam penelitian untuk memperoleh gambaran tentang latar subjek penelitian dalam hal ini organisasi NU. Baik itu latar sosial, budaya, historis maupun ajaran-ajaran yang dianut oleh komunitas tarekat.

b. Wawancara Mendalam

Jenis wawancara yang dipilih dalam penelitian adalah wawancara mendalam dengan teknik wawancara terbuka, dimana peneliti melakukan percakapan informal dengan informan tetapi tetap berusaha untuk tetap mengarahkan pembicaraan pada fokus penelitian. Hal itu dilakukan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari informan, tetapi susunan percakapan disesuaikan dengan suasana pada saat wawancara berlangsung dan kondisi informan.¹² Wawancara ini juga penting untuk memperoleh informasi-informasi yang biasanya sulit diungkapkan pada saat percakapan formal, dan menemukan apa yang informan pikirkan dan rasakan mengenai peristiwa tertentu.

Adapun teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik dimana informan “secara sengaja” dipilih untuk diwawancarai dengan alasan informan ini dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.¹³ Teknik tersebut digunakan pada penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan informan. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk dapat selektif dalam

¹² Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*,..... h.181

¹³ Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: DIA Fisip UI,2006, h.17

menentukan *key informan* dalam unit-unit populasi dalam penelitiannya.¹⁴ Berdasarkan pertimbangan di atas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengurus Dewan Syuriah Nahdlatul Ulama Kab. Majene.
- b. Pengurus Dewan Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kab. Majene.

Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, maka digunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif. Penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori, kemudian bergerak mencari bentuk teori yang menerangkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Ideal Nahdlatul Ulama (NU) dalam Menjalankan Peran Politik

Nahdlatul Ulama dalam menjalankan perannya sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan mempunyai nilai dasar yang menjadi pedoman mereka termasuk dalam melakukan proses pendidikan politik di masyarakat. Nilai dasar tersebut kemudian dikenal dengan dengan istilah *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang juga bisa disebut dengan kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme. Dimana jika dimaknai secara etimologi masing-masing adalah tengah-tengah, toleransi, seimbang, dan mengajak pada kebaikan dan mencegah hal yang buruk bagi masyarakat.

Dalam memaknai konsep nilai dasar tersebut, pada prakteknya warga NU terkadang masih besar dipengaruhi pada bagaimana para ulama kharismatik di NU dalam membumikan nilai-nilai dasar tersebut. Dalam hal melakukan pendidikan politik, NU sebagai organisasi Islam yang akhirnya memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik karena melihat manfaat yang didapatkan lebih sedikit daripada kerugian yang nanti dihadapi. Sikap politik tersebut kemudian populer dengan sebutan kembali ke

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2001), h.118.

khittah yang dimaknai sebagai sikap politik NU yang secara institusi tidak terikat dengan partai politik atau organisasi masyarakat lain.¹⁵

Konsekuensi logis dari khittah NU tahun 1926 adalah penegasan bahwa NU tidak lagi terikat oleh PPP.¹⁶ Namun walaupun begitu, secara personal jika terdapat warga bahkan tokoh sentral dari NU yang memilih untuk terlibat secara aktif dalam proses dan dinamika politik, maka bukan menjadi masalah bagi organisasi. Oleh karena dengan dianutnya 4 nilai dasar NU setiap perbedaan persepsi dapat disikapi secara damai. Hanya saja dalam Munas 1983, NU menegaskan untuk pengurus NU dilarang rangkap jabatan di organisasi politik manapun. Salah satu pertimbangan larangan rangkap jabatan tersebut adalah akan berakibat terbaginya perhatian dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas sosial keagamaan tetapi juga dapat menghambat usaha penampilan citra dan pelaksanaan kembalinya NU sebagai kelompok keagamaan.¹⁷ Dalam hal keterlibatan personal warga NU disikapi dengan syarat bahwa warga NU tersebut dalam keterlibatannya dalam politik praktis tidak mengatasnamakan sebagai sikap kelembagaan secara umum melainkan adalah hanya dianggap sebagai ekspresi pribadi saja.

Sikap yang cenderung moderat dalam menyikapi perbedaan internal dalam tubuh organisasi NU pun juga menjadi ciri khas warganya dalam menyikapi perbedaan di luar tubuh organisasinya. Banyak fakta sosial politik yang membuktikan bahwa NU selalu dapat berdiri di tengah-tengah dalam menyikapi perbedaan garis perjuangan setiap organisasi Islam lainnya. NU kemudian tidak pernah memberikan justifikasi salah bagi organisasi yang tidak sejalan dengannya dalam persepsi maupun jalan perjuangan dalam politik. Hal tersebut menjadi implikasi dari multitafsirnya konsep khittah NU bagi kalangan internal mereka sendiri. Khittah NU hanya menjadi wacana yang menggelambung dan berada di dunia utopia.¹⁸

Adapun perbedaan sikap politik dengan masyarakat yang terafiliasi pada organisasi lain disikapi dengan tidak mudah menyalahkan atau memusuhi. Selama

¹⁵ Abdul Muchit, Muzadi. *Lima Belas Tahun Kembali ke Khittah; Refleksi dan Evaluasi Kritis 1984-1999*, (Jakarta: Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXX, 1999), h. 51-59

¹⁶ Faisal Ismail, *Dilema NU: Antara Norma Etik dan Realita Politik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI, 2004), h. 54.

¹⁷ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: LTN NU, 1989), h. 191

¹⁸ Zainal Arifin Toha, *Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h.110

pebedaan tersebut tidak menyinggung hal yang prinsip, misalnya aqidah, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Dimana dalam konteks belakangan bagi fenomena politik membuktikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan NU sangat menjunjung tinggi asas demokrasi.

Konsep dasar bangunan nilai ideal NU dalam pendidikan politik, tentu tidak lepas dari filosofi tentang bagaimana internalisasi Islam sebagai sebuah ajaran agama dengan politik. Dalam hal ini terdapat tiga paradigma yang dikembangkan oleh para pemikir Islam baik klasik hingga modern. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan politik merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*); *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan politik merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*); *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa agama dan politik merupakan suatu yang harusnya terpisah (*sekularistik*).¹⁹

Sikap NU pun berada pada antara paradigma pertama dan kedua yang melihat ada relasi yang kuat antara konsep Islam dan politik itu sendiri. Dalam hal ini asumsi yang dibangun paradigma pertama yang menyatakan agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pada umumnya berpendirian bahwa:²⁰

- a) Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan dan politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
- b) Sistem politik islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan oleh keempat Khulafa al-Rasyidin.

Paradigma kedua yang menyatakan agama dan politik merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan untuk saling mendukung. Paradigma ini juga menolak anggapan bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang sebenarnya terpisah. Hal tersebut karena paradigma ini berangkat dari anggapan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai, etika dan moral yang mengatur kehidupan politik.²¹ Oleh karenanya, pendukung paradigma ini juga berkeyakinan bahwa politik membutuhkan

¹⁹Lihat Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV, 1993

²⁰ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.1

²¹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.1

pengaturan agama dan perkembangan agama juga membutuhkan tatanan politik yang ideal. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad saw, dimana agama dan politik adalah dua anak kembar, agama adalah dasar, penguasa negara adalah penjaga.²²

Adapun paradigma ketiga yang menyatakan perlu adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma pertama dan kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abd Raziq, seorang pemikir dari Mesir. Dalam kalangan umat Islam, paradigma tentang pemisahan antara agama dan politik bukan saja ditolak, tapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan dan asumsi-asumsi yang dilontarkannya tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada. Dalam pandangannya Ali Abdur Raziq mengemukakan sebagai berikut:²³

- a) Syariat Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi.
- b) Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi Muhammad saw dan Khulafa al-Rasyidin.
- c) Kekhalifan bukanlah suatu sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem duniawi.
- d) Kekhalifan tidak mempunyai dasar baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Nabi Muhammad saw tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi Nabi Muhammad saw adalah semata-mata utusan Allah SWT. Dia bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik.

Sebagai organisasi Islam yang bermazhab Syafi'iyah sebagai pengejawantahan dari ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah membuat NU pun juga menjadi sangat akomodatif terutama dalam merespon persoalan politik dan ketika memberikan warna tersendiri kepada kekuasaan.²⁴ Dengan asas moderat sebagai ciri NU, membuat konstruksi akan penafsiran nilai dasar dalam pendidikan politiknya pun sangat mungkin berbeda. Perbedaan tersebut pun sangat dipengaruhi oleh para kyai NU yang dalam banyak konteks sosial yang ada seringkali menjadi aktor utama dalam pembentukan opini publik dalam masyarakat NU pada umumnya.

²² Hussein Muhammad, "Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik", dalam Ahmad Suady, ed., *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LkiS, 2000) h. 93

²³ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.25-26

²⁴ Taufik Abdullah. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 199-205

Dalam hal ini posisi kyai dalam NU sangat berpotensi dalam menerjemahkan bahasa politik ke dalam bahasa agama yang mudah dipahami dan diterima para pengikutnya. Sekaligus menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan politik untuk berpartisipasi dalam suatu proses politik. Faktor utama munculnya model relasi antara para kyai dan pengikut ajaran NU tersebut adalah karena adanya kekuatan kharisma yang dimiliki oleh kyai. Kharisma dilukiskan sebagai kualitas-kualitas pribadi terkemuka dari individu-individu yang luar biasa kesuciannya. Sehingga sang pemilik kharisma memungkinkan untuk memerintah banyak orang dalam setiap interaksinya.²⁵

Nilai dalam pendidikan politik NU sangat dipengaruhi oleh konsep Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Hal tersebut karena secara historis memang lahirnya organisasi ini salah satu tujuannya adalah memperjuangkan dan melestarikan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah.²⁶ Walaupun sebenarnya nilai dari tradisi keagamaan berdasarkan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jama'ah telah ada dan mengakar di Indonesia jauh sebelum lahirnya NU sebagai sebuah organisasi pada 31 Januari 1926. Oleh karena itu, banyak juga yang mengasumsikan bahwa kehadiran NU adalah sebagai bentuk pelembagaan tradisi keagamaan di Indonesia.

Wacana Ahlu Sunnah wal Jama'ah sebagai nilai dan landasan ideologi utama bagi NU sangat mendominasi baik di kalangan kultural maupun strukturalnya, tak terkecuali sebagai nilai dalam pendidikan politik. Kekhasan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang luwes dan fleksibel membuat NU membentuk watak yang cenderung adaptif terhadap beragamnya perbedaan politik di Indonesia. Bahkan dalam hubungannya dengan penguasa, secara umum NU pun sangat akomodatif terhadap kekuasaan dari setiap adanya perubahan rezim di Indonesia dari masa ke masa.

Sebagai sebuah organisasi Islam, walaupun akhirnya memutuskan untuk menjadi organisasi yang tidak lagi bersentuhan dengan politik praktis, NU mempunyai catatan sejarah panjang dalam keterlibatannya dalam politik di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, NU merupakan salah satu pilar politik partai Masyumi. Bersama Muhammadiyah, partai ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai Islam sebagai alat perjuangan dan aspirasi umat Islam di Indonesia. Namun karena dalam

²⁵ Tom Campbel, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius 1994), h. 213

²⁶ Mujamil Qomar, *NU "Liberal" Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. (Bandung: Mizan, 2002), h.33

perkembangannya terdapat perbedaan pandangan, pada tahun 1952 NU keluar dari tubuh Masyumi.

Berpisahannya NU dari Masyumi tersebut ditegaskan dalam Mukttamar Palembang 1952 dimana NU menyatakan sebagai partai politik yang berdiri sendiri dan keluar dari tubuh Masyumi. Dengan begitu, maka orang Masyumi yang duduk di kabinet dari unsur NU, tidak lagi atas nama partai Masyumi namun atas nama partai Nahdlatul Ulama (NU). Kenyataan bahwa NU mempunyai basis massa yang banyak, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kala itu, membuat setiap penyusunan kabinet kekuatan NU menjadi sangat menentukan. Hal yang hingga sekarang pun juga masih sangat terasa. Bahkan partai NU menjadi salah satu partai politik yang terkuat kala itu bersama Masyumi dan PKI.

Hingga pada masa sejarah politik Indonesia memasuki babak baru dimana terjadi perubahan rezim dari presiden Sukarno ke presiden Suharto, kiprah politik NU sebagai partai politik juga memasuki babak baru. Setelah pemilu kedua di tahun 1971, pemerintah semakin memperkuat posisinya terhadap partai-partai politik dengan melakukan difusi. Dimana semula terdapat 9 partai politik, kemudian disederhanakan menjadi 3 partai politik. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap program-program yang dicanangkan pemerintah sekaligus untuk menyederhanakan sistem politik dengan tetap mempertahankan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat.

Pada fase tersebut NU bergabung dengan PPP bersama partai-partai Islam lainnya. Oleh karena kekuatan partai-partai Islam dalam PPP masing-masing saling memperebutkan dominasi sehingga pembagian kekuasaan dirasakan tidak adil oleh NU yang juga mengklaim mempunyai massa terbesar. Maka muncullah konsep khittah NU yang dianggap sebagai jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah keummatan. Dengan komitmen untuk mengembalikan NU sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan dakwah.

Dinamika Nahdlatul Ulama (NU) di Majene dalam Menjalankan Peran Pendidikan Politik

Dalam hal mengejewantahkan peran pendidikan politiknya, NU di Majene sangat dipengaruhi oleh tradisi kultural yang ada dalam tubuh internal NU. Selama ini

NU dianggap sebagai organisasi masyarakat yang paling konservatif dan tertutup, sehingga cenderung sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran, baik pemikiran keagamaan maupun pemikiran sosial dan politik. Hal tersebut disebabkan pembaruan pemikiran dalam sikap keagamaan NU dianggap sebagai suatu hal yang tabu karena NU hanya menerima interpretasi Islam yang tercantum dalam kitab kuning ortodoks, *al kutub al mu'tabarah*, terutama fiqh Syafi'i dan aqidah menurut mazhab Asy'ari, dan menekankan *taqlid* kepada ulama besar masa lalu.

Kuatnya praktik kultural NU dalam kegiatan ritual keagamaan di masyarakat Majene membuat media sosialisasi paling baik untuk melakukan pendidikan politik sesuai dengan nilai ideal NU adalah melalui dakwah. Metode ini menjadi pilar utama bagi organisasi ini untuk menularkan kepada masyarakat perihal pendidikan politik baik itu dilakukan di tempat-tempat ibadah, pada saat peringatan hari-hari besar keagamaan hingga pada pertemuan rutin warga NU pada arisan-arisan anggota. Begitupun dominannya para *muballigh* di Majene yang berlatar belakang NU juga menjadi faktor utama dalam mendukung proses pendidikan politik NU di Majene.

Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pendidikan politik di Majene adalah kurangnya inovasi dalam melakukan proses pendidikan politik. Gerakan organisasi cenderung monoton bahkan diakui bahwa secara kelembagaan NU tidak banyak berkontribusi dalam pendidikan politik di Majene. Namun yang melakukan progresifitas dalam berdakwah adalah individu-individu NU baik yang terikat sebagai anggota maupun simpatisan dari organisasi ini.

Adanya stigma negatif perihal dunia politik membuat NU di Majene seakan menjaga jarak. Belum lagi dominannya kader di NU Majene yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat kesibukan masing-masing anggota sulit terkonsolidasi. Oleh karena itu, bilamana terdapat kader NU di Majene secara aktif melakukan pendidikan politik di panggung-panggung dakwah, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai tanggung jawab sebagai pemuka agama.

Peran Patron Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pendidikan Politik di Majene

Dalam tradisi NU, peran patron sangat penting sebagai penggerak utama organisasi ini. Hal tersebut karena NU merupakan perkumpulan para kyai yang mencoba membangkitkan semangat para pengikutnya dan juga masyarakat pada

umumnya. Oleh karena itu, kyai pesantren dalam NU memiliki kedudukan sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali organisasi maupun sebagai panutan kaum nahdliyin.

Memahami NU sebagai organisasi secara tepat tentu tidak akan cukup bilamana hanya coba dipahami melalui jalan formal saja. Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, NU lebih lekat dengan masyarakat Majene dari sisi ritualnya. Dengan demikian, NU secara ritual jauh lebih dulu dipraktekkan oleh masyarakat dibanding dikenalnya NU sebagai sebuah model organisasi keagamaan yang modern.

Kuatnya tradisi NU dalam masyarakat Majene besar dipengaruhi oleh para pembawa ajaran Islam yang didominasi oleh para ulama kharismatik yang dicintai oleh para pengikutnya. Pengaruh tersebut masih terasa hingga saat ini dimana para ulama atau kyai NU mempunyai basis pengikut yang setia. Hubungan timbal balik ini kemudian, menjadi sangat potensial menjadi sebuah gerakan sosial yang kuat.

Kemampuan para ulama NU yang dapat berperan sebagai komunikator politik menuntut mereka sebagai benteng terakhir untuk dapat terus menyebarkan nilai ideal NU dalam berpolitik. Dalam menjalankan peran seperti ini para ulama NU dituntut agar dapat menerjemahkan bahasa politik menjadi bahasa agama, sehingga opini yang disampaikan dapat diterima ummat dengan lebih baik. Hal ini penting sebab *image* politik yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat identik sebagai hal jauh dari nilai-nilai moral

Secara sederhana hubungan patron-klien dapat digambarkan sebagai hubungan atau interaksi yang saling membutuhkan antara patron dan klien, akan tetapi terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Hubungan ini menjadi terjaga sebab disatu sisi ulama NU membutuhkan para pengikut atau ummat NU untuk dapat menjaga keberlangsungan ajaran ini di masyarakat. Di sisi lain para pengikut NU membutuhkan ulama sebagai penuntun dan pembimbing mereka dalam menjalankan ajaran agamanya.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang juga berfungsi sebagai agen budaya politik bagi masyarakat dimana dengan menjalankan peran demikian NU diharapkan dapat mentransformasikan nilai-nilai dalam menjalankan pendidikan politiknya. Nilai-nilai dasar tersebut adalah *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar*

ma'ruf nahi mungkar. Nilai ini menjadi pedoman bagi warga NU. Dalam terminologi lain, asas ini juga populer dengan istilah kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme.

Nilai ideal dalam pendidikan politik tersebut lahir dipengaruhi oleh paradigma dalam melihat Islam sebagai ajaran agama itu sendiri yang sangat erat kaitannya dengan politik sebagai salah satu aspek kehidupan yang tidak lepas dari pengaturan Islam itu sendiri. Sebagai organisasi yang berlandaskan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah, NU mengkonseptualisasikan nilai ideal dalam pendidikan politiknya juga dengan berlandaskan inti ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Walaupun pada akhirnya NU memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam politik praktis pada 1984, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi ini sangat berpengaruh dalam dinamika politik Indonesia. Hal tersebut karena kekuatan basis massa yang ideologis dan kharisma yang dimiliki oleh para tokoh NU baik kultural maupun struktural.

Di Majene sendiri peran NU lebih banyak dimotori oleh individu melalui dakwah dibanding secara kelembagaan. Hal tersebut justru dianggap memudahkan dan lebih cocok dijalankan dengan kondisi lokal yang ada. Dimana secara kultural jelas terlihat bahwa ibadah ritual keagamaan yang dipraktekkan oleh mayoritas penganut agama Islam di Majene sangat kental dengan NU.

Adapun konsolidasi NU di Majene dalam menjalankan peran pendidikan politik seringkali terhambat dengan stigma oleh kader NU sendiri yang melihat politik sebagai hal yang negatif. Hal tersebut berakibat pada kurang massifnya gerakan pendidikan politik secara kelembagaan. Selain itu, kondisi dimana dominannya kader NU yang aktifitas kesehariannya sebagai ASN juga seakan membatasi ruang gerak para kadernya untuk lebih intens menularkan pendidikan politik dengan corak NU kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1988. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Bungin, Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya; Airlangga University Press
- Campbel, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius

- Effendy, Bahtiar. 2001. *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ida, Laode. 2004. *Kaum Muda NU, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ismail, Faisal. 2004. *Dilema NU: Antara Norma Etik dan Realita Politik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad, Hussein. "Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik", dalam Ahmad Suady,ed., 2000, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta: LkiS
- Muhammadiyah, Hilmi dan Sulthan Fatoni. 2004. *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: Elsas.
- Mulyana, Dedy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya
- Muzadi. Abdul Muchit. 1999. *Lima Belas Tahun Kembali ke Khittah; Refleksi dan Evaluasi Kritis 1984-1999*. Jakarta: Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXX
- Prasetya, Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA Fisip UI
- Qomar, Mujamil. 2002. *NU "Liberal" Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan
- Romli, Lili. 2006, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sitompul, Einar Martahan. 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta: LTN NU
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: UI Press
- Syamsuddin, Din. 1993, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV
- Tutik, Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi. 2008. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher
- Toha, Zainal Arifin. 1997. *Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.